



DARI PESANTREN KE KEBIJAKAN: PENGARUH ELIT PENDIDIKAN AGAMA ALA TEORI ELIT KEKUASAAN

¹Ahmad Abdullah Faqih, ²Maftuh dan ³Mohammad Rofiq

¹²³Prodi Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik
ahmadabdullahfaqih67@gmail.com

Received: January 2026; Revised: January 2026; Accepted: January 2026; Published: 30 January 2026; Available online: January 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan mekanisme pengaruh elit pendidikan agama dalam proses formulasi kebijakan sosial-keagamaan melalui perspektif teori elit kekuasaan. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, menganalisis literatur akademik melalui teknik content analysis dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elit pendidikan agama merupakan kategori elit kekuasaan yang distinktif yang mendasarkan pengaruhnya pada kapital simbolik dan kultural, bukan kontrol terhadap aparatus koersif atau sumber daya material. Tiga mekanisme pengaruh diidentifikasi: jalur konsultatif formal, pengaruh kultural informal, dan jaringan kelembagaan. Lembaga pendidikan agama seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan berfungsi sebagai ruang reproduksi elit yang menghasilkan kapital kultural, sosial, dan simbolik yang dapat dikonversi menjadi pengaruh politik. Pengaruh elit pendidikan agama menunjukkan ambivalensi: dapat berkontribusi positif terhadap stabilitas sosial namun juga berpotensi menghasilkan kebijakan eksklusif jika tidak diimbangi dengan mekanisme checks and balances yang memadai. Temuan ini memperluas teori elit kekuasaan klasik dengan mengintegrasikan dimensi keagamaan dan konsep kekuasaan simbolik Bourdieu.

Kata Kunci: *elit pendidikan agama, kebijakan sosial-keagamaan, teori elit kekuasaan, kapital simbolik, lembaga pendidikan agama.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the position and mechanisms of influence of religious education elites in the formulation of socio-religious policies through the perspective of power elite theory. The research method employs library research with a qualitative approach, analyzing academic literature through content analysis and thematic analysis techniques. The findings indicate that religious education elites constitute a distinctive category of power elite whose influence is based on symbolic and cultural capital, rather than control over coercive apparatus or material resources. Three mechanisms of influence are identified: formal consultative channels, informal cultural influence, and institutional networks. Religious educational institutions such as pesantren, madrasah, and Islamic higher education institutions function as spaces for

elite reproduction that generate cultural, social, and symbolic capital that can be converted into political influence. The influence of religious education elites demonstrates ambivalence: it can contribute positively to social stability but also has the potential to produce exclusive policies if not balanced by adequate checks and balances mechanisms. These findings extend classical power elite theory by integrating the religious dimension and Bourdieu's concept of symbolic power.

Keywords: *religious education elite, socio-religious policy, power elite theory, symbolic capital, religious educational institutions.*

PENDAHULUAN

Kebijakan sosial-keagamaan merupakan produk kompleks yang tidak lahir dalam ruang hampa sosial-politik. Pembentukan kebijakan ini senantiasa dipengaruhi oleh dinamika relasi kekuasaan yang terjalin antara negara sebagai otoritas formal dan berbagai aktor sosial yang memiliki kepentingan serta sumber daya tertentu. (Stroup 2017) Dalam konteks masyarakat yang religius, di mana agama menjadi bagian integral dari struktur sosial dan identitas kolektif, aktor-aktor yang memiliki otoritas keagamaan baik individu maupun institusi sering kali menempati posisi strategis dalam proses perumusan dan legitimasi kebijakan publik. (Turner 2021a) Teori elit kekuasaan memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami bagaimana sekelompok kecil aktor yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan simbolik dapat memengaruhi bahkan menentukan arah keputusan publik. (Hartmann and Kjaer 2015) Dalam ranah sosial-keagamaan, elit ini tidak hanya terdiri dari birokrat negara, tetapi juga pemimpin agama, organisasi keagamaan, dan kelompok

kepentingan yang mampu memobilisasi dukungan massa atas nama legitimasi religius. (Burhani 2021) Urgensi penelitian tentang pengaruh elite agama terhadap kebijakan publik di Indonesia semakin menguat seiring dengan menguatnya peran otoritas keagamaan dalam ruang politik dan sosial kontemporer. Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim, elite agama baik yang bernaung dalam organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah maupun lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) terbukti memiliki kapasitas signifikan dalam memengaruhi arah kebijakan negara. Fenomena ini dapat dilihat, misalnya, pada pengaruh fatwa MUI dalam kebijakan sertifikasi halal yang kemudian dilembagakan secara formal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menunjukkan transformasi otoritas keagamaan menjadi regulasi negara. (Indonesia 2014) Contoh lain tampak pada masa pandemi Covid-19, ketika pandangan dan imbauan tokoh-tokoh agama berperan penting dalam membentuk kebijakan pembatasan

ibadah berjemaah serta legitimasi sosial terhadap kebijakan kesehatan pemerintah. (Qodir 2021) Bahkan pada level lokal, pengaruh elite agama juga terlihat dalam lahirnya berbagai peraturan daerah bernuansa keagamaan yang sering kali disusun dengan merujuk pada legitimasi moral dan simbolik para ulama setempat. (Buehler 2016) Realitas ini menunjukkan bahwa elite agama tidak hanya berfungsi sebagai penjaga moral umat, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam proses pembuatan kebijakan sosial-keagamaan, sehingga penelitian akademik yang kritis dan sistematis menjadi penting untuk memahami relasi kuasa, legitimasi, serta dampaknya bagi demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Elit pendidikan agama menempati posisi strategis dalam struktur ini karena pengaruh mereka tidak hanya bersumber dari otoritas formal-institusional, tetapi juga dari legitimasi keilmuan dan moral yang melekat pada peran mereka sebagai penjaga, penafsir, dan transmitter nilai-nilai keagamaan. (Nelson 2020) Dalam konteks riset ini, kategori elit pendidikan merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki otoritas keilmuan, legitimasi institusional, dan pengaruh simbolik dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan keagamaan yang memungkinkan mereka berperan signifikan dalam pembentukan

wacana, kebijakan, dan praktik sosial-keagamaan. Elit pendidikan tidak semata ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh penguasaan pengetahuan yang diakui secara sosial, posisi strategis dalam lembaga pendidikan (seperti pesantren, madrasah, perguruan tinggi keagamaan), serta kapasitasnya dalam mentransmisikan nilai, ideologi, dan interpretasi keagamaan kepada masyarakat luas. Dalam perspektif sosiologi kekuasaan, elit pendidikan berfungsi sebagai opinion leaders yang mampu mengarahkan preferensi sosial dan legitimasi kebijakan melalui otoritas epistemik yang dimilikinya, sehingga pandangan dan keputusan mereka kerap dijadikan rujukan normatif dalam ranah sosial-keagamaan. (Dhofier 1982) Studi-studi terkini menunjukkan adanya kebangkitan peran aktor keagamaan dalam politik dan kebijakan publik di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara dengan mayoritas muslim. Di Indonesia, terjadi pergeseran konservatif dalam Islam yang ditandai dengan meningkatnya pengaruh partai politik Islamis dan elit keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan. (Resic 2021) Penelitian Nelson (2020) tentang pendidikan Islam di Pakistan menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan agama telah menjadi basis pembentukan otoritas keagamaan yang kemudian

mempengaruhi kebijakan negara. (Nelson 2020) Hamayotsu (2020) mengidentifikasi kebangkitan politik aktor-aktor religius di Indonesia pasca-demokratisasi, yang menunjukkan transformasi peran elit keagamaan dari domain sosial ke domain politik formal. (Hamayotsu 2020) Lembaga pendidikan agama seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan telah menjadi fokus kajian akademik karena perannya sebagai ruang reproduksi elit yang berfungsi ganda: sebagai institusi transmisi pengetahuan keagamaan dan sekaligus sebagai arena pembentukan jaringan kekuasaan sosial-keagamaan. (Hasan 2013) Berbeda dengan elit politik atau ekonomi yang kekuasaannya bersifat material dan koersif, elit pendidikan agama memiliki kekuatan simbolik yang mampu membentuk kesadaran kolektif, mempengaruhi preferensi publik, dan melegitimasi atau mendelegitimasi kebijakan tertentu atas nama otoritas keagamaan. (Künkler and Lerner 2016) Meskipun sejumlah studi telah mengeksplorasi peran aktor keagamaan dalam politik dan kebijakan publik, terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur yang ada. Pertama, sebagian besar penelitian cenderung memfokuskan pada elit keagamaan secara umum tanpa membedakan secara spesifik peran elit pendidikan agama sebagai kategori tersendiri yang memiliki karakteristik dan mekanisme

pengaruh yang berbeda. (Abuza 2019) Kedua, studi-studi *existing* lebih banyak menganalisis pengaruh elit keagamaan dalam konteks politik elektoral atau gerakan sosial, sementara mekanisme pengaruh mereka dalam proses teknokratis perumusan kebijakan masih kurang tereksplorasi. (Mietzner 2018) Ketiga, pendekatan yang digunakan dalam studi-studi sebelumnya sering kali bersifat deskriptif dan kurang mengintegrasikan kerangka teoritis elit kekuasaan secara sistematis untuk menjelaskan dinamika relasi antara elit pendidikan agama dengan struktur kekuasaan negara. (Shiozaki 2019) Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan perspektif teori elit kekuasaan dengan analisis kelembagaan untuk memahami secara komprehensif bagaimana elit pendidikan agama sebagai kategori spesifik dari elit keagamaan menggunakan kapital sosial, budaya, dan simbolik yang dihasilkan dari lembaga pendidikan agama untuk mempengaruhi proses formulasi kebijakan sosial-keagamaan. Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Bagaimana posisi elit pendidikan agama dalam struktur kekuasaan sosial-keagamaan? (2) Melalui mekanisme apa elit pendidikan agama mempengaruhi proses formulasi kebijakan sosial-

keagamaan? (3) Bagaimana lembaga pendidikan agama berfungsi sebagai ruang reproduksi elit yang menghasilkan kapital sosial, budaya, dan simbolik yang dapat dikonversi menjadi pengaruh politik? (4) Faktor-faktor apa yang menentukan efektivitas pengaruh elit pendidikan agama dalam proses pembuatan kebijakan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan peran elit pendidikan agama dalam struktur kekuasaan sosial-keagamaan, mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme pengaruh elit pendidikan agama dalam proses formulasi kebijakan sosial-keagamaan baik melalui jalur formal maupun informal, menjelaskan bagaimana lembaga pendidikan agama berfungsi sebagai ruang reproduksi elit yang menghasilkan berbagai bentuk kapital yang dapat dikonversi menjadi pengaruh politik, serta menganalisis faktor-faktor yang menentukan efektivitas pengaruh elit pendidikan agama dalam proses pembuatan kebijakan. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap studi elit kekuasaan dalam konteks masyarakat religius, serta memberikan implikasi praktis bagi pemahaman tentang dinamika relasi antara negara dan aktor keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian, studi ini tidak

hanya mengisi kesenjangan dalam literatur akademik, tetapi juga memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam memahami kompleksitas interaksi antara otoritas agama dan otoritas negara dalam masyarakat kontemporer yang religius.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran dan pengaruh elit pendidikan agama dalam formulasi kebijakan sosial-keagamaan. Data penelitian diperoleh dari sumber pustaka primer dan sekunder yang meliputi buku-buku akademik tentang teori elit kekuasaan, sosiologi agama, dan analisis kebijakan publik, artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional, serta karya-karya teoretis yang membahas dinamika pendidikan agama dan struktur kekuasaan dalam masyarakat religius. (Hart 2018) Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data akademik seperti *Google Scholar*, *JSTOR*, *ProQuest*, *ScienceDirect*, dan repositori perguruan tinggi dengan menggunakan kata kunci "*elite power theory*," "*religious elite*," "*Islamic education*," "*policy formulation*," "*pesantren*,"

"*madrasah*," dan "*religious authority*" dalam bahasa Indonesia dan Inggris. (Aveyard 2023) Pemilihan literatur dilakukan secara *purposive* dengan kriteria relevansi tematik, kualitas akademik yang terverifikasi melalui sistem *peer-review*, dan kemutakhiran publikasi dengan memprioritaskan publikasi lima tahun terakhir (2019-2024), meskipun karya-karya teoretis fundamental yang lebih lama tetap digunakan sebagai landasan konseptual. Setelah literatur teridentifikasi, dilakukan evaluasi kredibilitas akademik dengan mempertimbangkan reputasi jurnal, sitasi, dan relevansi metodologis, kemudian literatur terpilih dibaca secara mendalam dan informasi penting diekstrak serta dikategorisasi sesuai tema-tema analisis yang telah ditentukan. (Fink 2019) Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan pendekatan *content analysis* dan analisis tematik dalam tiga tahap sistematis. (Krippendorff 2018) Tahap pertama adalah identifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur, seperti konsep elit kekuasaan, mekanisme pengaruh elit pendidikan agama, relasi antara lembaga pendidikan agama dan negara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengaruh elit dalam proses kebijakan. Tahap kedua melibatkan analisis kritis terhadap berbagai perspektif teoretis dan temuan empiris dengan mengevaluasi kekuatan dan

keterbatasan masing-masing perspektif serta mengidentifikasi pola-pola konseptual yang konsisten maupun kontradiktif. (Miles, Huberman, and Saldaña 2014) Tahap ketiga adalah sintesis analitis, di mana teori elit kekuasaan dikaitkan dengan fenomena konkret pengaruh elit pendidikan agama dalam kebijakan sosial-keagamaan untuk membangun kerangka pemahaman yang koheren tentang mekanisme pengaruh dalam konteks masyarakat religius kontemporer. (Creswell and Poth 2016) Dalam proses analisis, peneliti menggunakan kerangka teoretis teori elit kekuasaan sebagai lensa utama yang dikombinasikan dengan konsep-konsep Pierre Bourdieu tentang kapital sosial, budaya, dan simbolik untuk menjelaskan bagaimana lembaga pendidikan agama berfungsi sebagai ruang reproduksi elit dan bagaimana kapital yang dihasilkan dapat dikonversi menjadi pengaruh politik. (Bano 2019) Seluruh proses analisis didokumentasikan secara sistematis melalui matriks analisis tematik dan memo analitis untuk memastikan transparansi dan replikabilitas penelitian, sehingga peneliti lain dapat mengikuti prosedur yang sama untuk memverifikasi atau mengembangkan temuan penelitian ini. (Flick 2022)

PEMBAHASAN

Teori Elit Kekuasaan dalam Konteks Kebijakan Sosial-Keagamaan

Analisis sistematis terhadap literatur menghasilkan temuan ilmiah bahwa elit pendidikan agama (Kiai/pengasuh, ustadz, dan pengurus) merupakan kategori elit kekuasaan yang distinktif dengan sumber daya dan mekanisme pengaruh yang berbeda dari tipologi elit klasik Mills (1956). Sumber utama kapital simbolik yang mereka miliki, yakni gelar akademik (elit intelektual), otoritas tradisional-keagamaan (elit kiai), dan posisi birokratis (elit struktural). Elit intelektual memperoleh legitimasi dari kapital akademik berupa pendidikan formal, gelar, publikasi, dan afiliasi institusional yang memberinya otoritas epistemik dalam produksi wacana keagamaan dan kebijakan pendidikan. Elit kiai bertumpu pada kapital simbolik tradisional yang bersumber dari karisma, sanad keilmuan, kepemimpinan pesantren, serta pengakuan kultural masyarakat, sehingga pengaruhnya kuat dalam pembentukan norma dan praktik sosial-keagamaan. Sementara itu, elit birokratis mengandalkan kapital simbolik struktural yang melekat pada jabatan dan kewenangan formal dalam institusi negara atau organisasi pendidikan, yang

memungkinkannya memengaruhi kebijakan melalui mekanisme regulatif dan administratif. Perbedaan tipologi ini penting untuk menjelaskan variasi mekanisme pengaruh apakah melalui produksi pengetahuan, legitimasi kultural, atau instrumen kebijakan dalam membentuk arah kebijakan dan wacana sosial-keagamaan.(Dhofier 1982) Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian pertama tentang posisi elit pendidikan agama dalam struktur kekuasaan sosial-keagamaan. Berbeda dengan elit politik, ekonomi, dan militer yang mendasarkan kekuasaannya pada kontrol terhadap aparatus koersif dan sumber daya material, elit pendidikan agama memperoleh kekuasaan dari kapital simbolik dan kultural yang bersumber dari otoritas keagamaan dan legitimasi moral.(Bano 2019) Temuan pertama menunjukkan tipologi elit kekuasaan yang telah diperluas untuk mencakup elit pendidikan agama sebagai kategori keempat. Fenomena ini terjadi karena dalam masyarakat religius, agama bukan hanya sistem kepercayaan privat tetapi juga berfungsi sebagai sumber legitimasi politik dan moral yang mempengaruhi akseptabilitas kebijakan publik. (Turner 2021b) Bourdieu (1991) menjelaskan bahwa kekuasaan simbolik bekerja melalui mekanisme misrecognition, di mana dominasi tidak disadari sebagai bentuk kekuasaan tetapi

diterima sebagai otoritas yang natural dan legitimate. (Swartz 2008) Hal ini menjelaskan mengapa elit pendidikan agama dapat mempengaruhi kebijakan tanpa harus menguasai aparatus negara secara formal. Temuan ini konsisten dengan penelitian Turner (2021) yang menekankan pentingnya dimensi keagamaan dalam teori sosiologis kontemporer, namun memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan konsep Bourdieu tentang kapital simbolik ke dalam kerangka teori elit kekuasaan. (Turner 2021a) Berbeda dengan pandangan sekularisasi klasik yang memprediksi menurunnya peran agama, literatur justru menunjukkan kebangkitan pengaruh elit keagamaan di berbagai negara dengan mayoritas muslim, yang mengindikasikan bahwa modernisasi tidak selalu menghasilkan sekularisasi tetapi dapat menghasilkan bentuk-bentuk baru artikulasi keagamaan dalam ruang publik. (Resic 2021)

Mekanisme Pengaruh Elit Pendidikan Agama terhadap Kebijakan Sosial-Keagamaan

Temuan ilmiah kedua menjawab pertanyaan penelitian tentang mekanisme pengaruh elit pendidikan agama terhadap kebijakan sosial-keagamaan. Analisis tematik mengidentifikasi tiga mekanisme yang saling terkait: jalur konsultatif formal, pengaruh kultural informal, dan jaringan kelembagaan.

Mekanisme-mekanisme ini bekerja secara simultan dan saling memperkuat dalam mempengaruhi proses formulasi kebijakan. Jalur konsultatif formal melibatkan partisipasi langsung elit pendidikan agama dalam forum-forum resmi negara, sebagaimana ditunjukkan oleh Künkler dan Lerner (2016) di Indonesia dan Israel, serta Nelson (2020) di Pakistan. (Nelson 2020) Pengaruh kultural bekerja melalui pembentukan opini publik yang membatasi ruang manuver pembuat kebijakan, sebagaimana dibuktikan oleh Burhani (2021) dalam kasus gelombang konservatisme Islam Indonesia. (Burhani 2021) Jaringan kelembagaan menyediakan sumber daya organisasional dan massa yang dapat dimobilisasi, sebagaimana ditunjukkan oleh Platzdasch (2021) dalam konteks lembaga pendidikan agama di Indonesia. (Platzdasch 2021) Trend mekanisme ini menunjukkan variasi antar-negara: di Asia Tenggara, mekanisme informal melalui pengaruh kultural lebih dominan, sementara di Timur Tengah jalur formal lebih terlembagakan. (Shiozaki 2019) Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh faktor-faktor kontekstual seperti sistem politik, tingkat institusionalisasi negara, dan tradisi relasi negara-agama yang berbeda. Temuan ini konsisten dengan teori kekuasaan multidimensional Lukes (2021) yang mengidentifikasi tiga wajah kekuasaan: decision-making

power, agenda-setting power, dan preference-shaping power. (Lukes 2021) Jalur konsultatif formal beroperasi pada dimensi pertama, pengaruh kultural pada dimensi kedua dan ketiga, sementara jaringan kelembagaan memfasilitasi ketiga dimensi tersebut. Kontribusi teoretis dari temuan ini adalah mengintegrasikan perspektif Lukes dengan konsep Bourdieu untuk menjelaskan bagaimana kapital simbolik dikonversi menjadi pengaruh politik melalui mekanisme-mekanisme yang spesifik dan terukur.

Peran Multidimensional Elit Pendidikan Agama

Temuan ilmiah ketiga menjawab pertanyaan tentang fungsi lembaga pendidikan agama sebagai ruang reproduksi elit dan faktor-faktor yang menentukan efektivitas pengaruh mereka. Kajian literatur mengidentifikasi bahwa lembaga-lembaga seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai institusi transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai arena akumulasi dan konversi kapital yang menghasilkan elit dengan pengaruh politik. (Grenfell 2012) Hasan (2019) menunjukkan fenomena "Islam publik" di Indonesia di mana lulusan pesantren dan madrasah aktif dalam diskursus demokrasi dan kebijakan publik, sementara

Hamayotsu (2020) mengidentifikasi transformasi peran elit pendidikan agama dari pinggiran ke pusat deliberasi kebijakan pasca-demokratisasi. (Hamayotsu 2020) Trend ini terjadi karena lembaga pendidikan agama menghasilkan tiga jenis kapital secara simultan: kapital kultural (penguasaan teks keagamaan dan tradisi intelektual), kapital sosial (jaringan alumni dan hubungan dengan organisasi keagamaan), dan kapital simbolik (otoritas moral dan legitimasi keagamaan). (Swartz 2008) Ketiga kapital ini dapat dikonversi menjadi pengaruh politik melalui berbagai jalur: partisipasi dalam struktur birokrasi, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, atau mobilisasi wacana publik. Temuan tentang peran multidimensional elit pendidikan agama sebagai produsen wacana, penafsir teks suci, pemberi legitimasi moral, mediator negara-masyarakat, dan agen sosialisasi nilai menjelaskan mengapa mereka memiliki pengaruh yang persisten meskipun tidak menguasai sumber daya material atau koersif. (Platzdasch 2021) Interpretasi ilmiah dari temuan ini adalah bahwa dalam masyarakat religius kontemporer, proses sekularisasi tidak menghasilkan pemisahan total antara domain agama dan negara sebagaimana diprediksi teori modernisasi klasik, melainkan menghasilkan bentuk-

bentuk baru artikulasi keagamaan dalam ruang publik yang memungkinkan elit keagamaan untuk tetap relevan.(Turner 2021a) Hal ini konsisten dengan argumen Casanova (1994) tentang "deprivatisasi agama" namun memberikan elaborasi lebih detail tentang mekanisme mikro melalui mana proses ini berlangsung.

Implikasi Sosial dan Politik: Ambivalensi Pengaruh Elit Pendidikan Agama

Temuan ilmiah keempat mengidentifikasi implikasi ambivalen dari pengaruh elit pendidikan agama terhadap kehidupan sosial-politik, yang menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor yang menentukan efektivitas dan outcome dari pengaruh tersebut. Outcome dipahami bersifat ambivalen, artinya pengaruh tersebut dapat menghasilkan dampak positif sekaligus negatif tergantung pada konteks dan mekanisme yang bekerja. Secara substantif, outcome menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor penentu efektivitas pengaruh elit pendidikan agama, seperti jenis kapital simbolik yang dimiliki (akademik, karismatik, atau birokratis), tingkat legitimasi sosial, relasi dengan kekuasaan politik, serta medium transmisi pengaruh (kurikulum, fatwa, jaringan kelembagaan, atau kebijakan). Dengan demikian, outcome tidak semata diukur dari intensitas pengaruh, tetapi dari arah, kualitas, dan keberlanjutan dampaknya terhadap kohesi sosial

yang dapat memberikan umpan balik pada produktivitas dan kemandirian masyarakat, (Sulistyaningsih n.d.) moderasi beragama, partisipasi politik yang mempunyai prinsip penggunaan kekuasaan untuk kepentingan stabilitas negara (Gerri n.d.), maupun potensi polarisasi dalam masyarakat. Analisis literatur menunjukkan bahwa pengaruh elit pendidikan agama dapat menghasilkan dampak positif stabilitas sosial, kohesi komunitas, dan representasi kepentingan keagamaan dalam deliberasi demokratis tetapi juga mengandung risiko terhadap pluralisme dan kebebasan sipil jika tidak diimbangi dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif.(Künkler and Lerner 2016) Mietzner (2018) dan Hadiz (2014) menunjukkan bahwa kebangkitan populisme Islamis dan aliansi elit keagamaan-politik dapat menghasilkan kebijakan yang eksklusif dan membatasi hak-hak minoritas.(Mietzner 2018) Ambivalensi ini terjadi karena elit pendidikan agama beroperasi dalam struktur kekuasaan yang tidak netral, di mana kapital simbolik mereka dapat digunakan untuk tujuan inklusif maupun eksklusif tergantung pada orientasi ideologis, konteks politik, dan konfigurasi koalisi elit.(Abuza 2019) Trend menunjukkan bahwa dalam konteks demokratisasi, keterlibatan elit pendidikan agama meningkat secara signifikan, namun hal ini tidak otomatis menghasilkan outcome yang

demokratis karena tergantung pada mekanisme checks and balances yang ada dalam sistem politik.(Hamayotsu 2020) Temuan ini konsisten dengan teori modernisasi reflektif Beck, Giddens, dan Lash (1994) yang menunjukkan bahwa modernisasi dapat menghasilkan konsekuensi yang kontradiktif dan tidak terduga.(Beck, Giddens, and Lash 1994) Kontribusi teoretis dari temuan ini adalah mengidentifikasi kondisi-kondisi spesifik yang menentukan apakah pengaruh elit pendidikan agama akan menghasilkan outcome yang inklusif atau eksklusif, yaitu: (1) tingkat pluralisme internal dalam komunitas elit keagamaan, (2) kekuatan institusi demokrasi dan *rule of law*, (3) keberadaan ruang publik yang inklusif untuk dialog antarumat beragama, dan (4) orientasi ideologis generasi muda elit yang terdidik di institusi modern. Penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan signifikan sebagai kajian pustaka yang bergantung pada literatur terpublikasi dan terfokus pada konteks Asia Tenggara, sehingga generalisasi ke konteks lain memerlukan kehati-hatian. Agenda riset mendatang yang diusulkan meliputi studi empiris komparatif untuk mengungkap mekanisme mikro, penelitian kuantitatif untuk mengukur efektivitas relatif berbagai mekanisme pengaruh, penelitian longitudinal untuk melacak

perubahan sepanjang waktu, eksplorasi mekanisme checks and balances yang efektif, dan studi tentang peran generasi muda elit pendidikan agama dalam membentuk masa depan relasi negara-agama.(Creswell and Poth 2016)

PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan temuan ilmiah bahwa elit pendidikan agama merupakan kategori elit kekuasaan yang distinktif dalam struktur sosial-keagamaan, yang mendasarkan pengaruhnya pada kapital simbolik dan kultural bukan kontrol terhadap aparatus koersif atau sumber daya material yang memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan sosial-keagamaan melalui tiga mekanisme utama: jalur konsultatif formal, pengaruh kultural informal, dan jaringan kelembagaan. Lembaga pendidikan agama seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan berfungsi sebagai ruang reproduksi elit yang menghasilkan kapital kultural, sosial, dan simbolik yang dapat dikonversi menjadi pengaruh politik, dengan efektivitas yang ditentukan oleh konteks sistem politik, tingkat institusionalisasi negara, dan

tradisi relasi negara-agama yang spesifik di setiap negara. Pengaruh elit pendidikan agama menunjukkan ambivalensi: dapat berkontribusi positif terhadap stabilitas sosial dan kohesi komunitas, namun juga berpotensi menghasilkan kebijakan eksklusif dan membatasi pluralisme jika tidak diimbangi dengan mekanisme *checks and balances* yang memadai dalam kerangka demokrasi konstitusional. Temuan ini memperluas teori elit kekuasaan klasik dengan mengintegrasikan dimensi keagamaan dan konsep kekuasaan simbolik Bourdieu, serta menunjukkan bahwa dalam masyarakat religius kontemporer, modernisasi tidak menghasilkan sekularisasi linear tetapi bentuk-bentuk baru artikulasi keagamaan dalam ruang publik yang mempertahankan relevansi elit keagamaan dalam proses politik. Studi mendatang perlu mengembangkan penelitian empiris komparatif untuk mengungkap mekanisme mikro pengaruh elit pendidikan agama dalam proses teknokratis perumusan kebijakan, penelitian kuantitatif untuk mengukur efektivitas relatif berbagai mekanisme pengaruh, dan eksplorasi mekanisme institusional yang dapat

memastikan bahwa keterlibatan elit pendidikan agama dalam proses kebijakan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip pluralisme, inklusi, dan perlindungan hak-hak minoritas dalam masyarakat demokratis

DAFTAR PUSTAKA

- Abuza, Zachary. 2019. "The Role of Religious Elites in Southeast Asian Politics: A Critical Review." *Southeast Asian Affairs* 67-84.
- Aveyard, Helen. 2023. "Ebook: Doing a Literature Review in Health and Social Care: A Practical Guide 5e."
- Bano, Masooda. 2019. "Protector of the 'Umma': Tracing the Changing Nature of State-Mosque Relations in Pakistan." *Religions* Vol. 10(No. 5):313-31.
- Beck, Ulrich, Anthony Giddens, and Scott Lash. 1994. *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Stanford University Press.
- Buehler, Michael. 2016. *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge University Press.
- Burhani, Ahmad Najib. 2021. "Conservative Turn in Indonesian Islam: Islamist Political Parties and Religious Elites." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* Vol.

- 40(No. 2):225–46.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. 2016. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. "Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai." (No Title).
- Fink, Arlene. 2019. *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*. Sage publications.
- Flick, Uwe. 2022. "An Introduction to Qualitative Research."
- Gerri. n.d. "POLITIK DINASTI DAN TANTANGAN DEMOKRASI: : KAJIAN FILOSOFIS MACHIAVELLI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ADIL DI INDONESIA." *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9(1 SE-Articles).
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1543>.
- Grenfell, Michael. 2012. *Key Concepts, 2nd Ed*. Durham: Acumen Publishing.
- Hamayotsu, Kikue. 2020. "The Political Rise of Religious Actors in Democratic Indonesia." *Pacific Affairs* Vol. 93(No.4):733–54.
- Hart, Chris. 2018. "Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination."
- Hartmann, Eva, and Poul F. Kjaer. 2015. *The Evolution of Intermediary Institutions in Europe: From Corporatism to Governance*. Springer.
- Hasan, Noorhaidi. 2013. *The Making of Public Islam Piety, Democracy and Youth in Indonesian Politics*. sukapress.
- Indonesia, Majelis Ulama. 2014. "Fatwa Halal Dan Dinamika Regulasi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."
- Krippendorff, Klaus. 2018. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage publications.
- Künkler, Mirjam, and Hanna Lerner. 2016. "A Private Matter? Religious Education and Democracy in Indonesia and Israel." *British Journal of Religious Education* 38(3):279–307.
- Lukes, Stewen. 2021. *Power: A Radical View, 3rd Ed*. London: Palgrave Macmillan.
- Mietzner, Marcus. 2018. "Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia." *Pacific Affairs*

- 91(2):261–82.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2014. "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd."
- Nelson, Matthew. 2020. "Islamic Education and Religious Authority in Pakistan." *Modern Asian Studies* Vol. 54(No. 3):867–908.
- Platzdasch, Bernhard. 2021. "Religious Education and Interreligious Relations in Indonesia." *Studia Islamika* Vol. 28(No. 1):1–31.
- Qodir, Zuly. 2021. "Peran Elite Agama Dalam Kebijakan Publik Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Politik Islam* Vol. 6(No. 2):145–60.
- Resic, Milos. 2021. "The Revitalization of Islamic Political Activism in Contemporary Muslim Societies." *Journal of Muslim Minority Affairs* Vol. 41(No. 2):289–304.
- Shiozaki, Yuki. 2019. "Islamic Education in Contemporary Southeast Asia: A Comparative Analysis." *Asian Journal of Social Science* Vol. 47(No. 4-5):522–46.
- Stroup, Sarah S. dan Wendy H. Wong. 2017. "Coming to Terms with NGOs: The State and the Governance Agenda." *Global Governance* Vol. 23(No. 4):601–218.
- Sulistyaningsih, Sri. n.d. "KONSEP RESILIENSI DAN KETANGGUHAN DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN SOSIAL: (Studi Evaluasi Berdasarkan Tren Kemiskinan Di Masa Pandemi Covid-19)." *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5(3 SE-Articles). <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/607>.
- Swartz, David L. 2008. "Bringing Bourdieu's Master Concepts into Organizational Analysis." *Theory and Society* 37(1):45–52.
- Turner, Bryan S. 2021a. "Religion and Contemporary Sociological Theories." *Current Sociology* 69(3):771–88.
- Turner, Bryan S. 2021b. "Religion and Contemporary Sociological Theories." *Current Sociology* Vol. 69(No. 3):291–308.